



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Clarity in Transition
Hadapi Transisi, Kinerja Teruji

Laporan Kinerja
KPKNL Bontang
2025

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	2
BAB I PENDAHULUAN.....	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	4
C. PERAN STRATEGIS	7
D. SISTEMATIKA LAPORAN.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. PERENCANAAN STRATEGIS	9
B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	13
C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	18
B. REALISASI ANGGARAN	31
C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA.....	33
D. KINERJA LAIN LAIN	33
BAB IV PENUTUP	34

KATA SAMBUTAN

“Secara keseluruhan kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bontang pada tahun 2025 berjalan dengan sangat baik dan memenuhi target yang ditetapkan di awal tahun. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPKNL Bontang di Tahun 2025 tercatat sebesar 116,60% meningkat sebesar 1.25% dari tahun sebelumnya.”

Sebagai instansi di bawah naungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL Bontang telah menjalankan tugasnya dalam melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. KPKNL Bontang telah berkontribusi positif dalam menyumbangkan realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang DJKN sebesar **Rp11,37 M** atau **125,58%** dari target sebesar Rp9,05 M yang telah ditetapkan. Hal ini selaras dengan visi Kementerian Keuangan, yaitu Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

KPKNL Bontang juga berperan dalam mewujudkan pengelolaan aset negara yang optimal melalui Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara, Pensertipikatan BMN, serta Portofolio Aset pada satker di wilayah kerjanya. Upaya pembinaan dilakukan secara berkesinambungan guna mengoptimalkan pemanfaatan atas aset negara secara maksimal sehingga memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang sehat dan berkelanjutan.

Disamping itu, peran KPKNL Bontang juga dirasakan pemerintah daerah dalam upaya perbaikan kualitas piutang daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). KPKNL Bontang mendorong penyelesaian piutang melalui optimalisasi penagihan dan tahapan pengurusan piutang negara.

Penilai juga menjadi salah satu bagian yang berkontribusi besar dalam menghasilkan nilai BMN/BMD yang akuntabel dan profesional guna mengoptimalkan potensi Lelang dari penjualan Lelang Non Eksekusi Wajib BMN/BMD yang berdampak positif bagi seluruh masyarakat.

Secara keseluruhan kinerja KPKNL Bontang Tahun 2025 berjalan dengan sangat baik dan memenuhi target yang ditetapkan di awal tahun. Pengelolaan risiko juga sudah berhasil memitigasi dampak negatif terhadap pencapaian sasaran strategis.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja KPKNL Bontang Tahun 2025 ini dapat dimanfaatkan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan umpan balik bagi organisasi untuk mendorong kinerja kami selaku pengelola aset negara dalam rangka meningkatkan realisasi penerimaan negara yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Bontang



Ditandatangani secara elektronik
Anas Waskita Jati

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2025, KPKNL Bontang menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja KPKNL Bontang selama tahun 2025. Hal ini sesuai dengan Amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LAKIN tahun 2025 memuat capaian kinerja berdasarkan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja milik Kepala KPKNL Bontang ditetapkan secara berjenjang dan *cascading* dari tujuan strategis DJKN. Perjanjian ini dibuat dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra).

Visi DJKN

“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Misi DJKN

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan; dan
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk menunjang pencapaian visi dan misi tersebut, disusunlah Peta Strategi KPKNL Bontang Tahun 2025 berdasarkan metodologi *balanced scorecard* yang terdiri dari empat perspektif yaitu *stakeholder*, *customer*, *internal process*, dan *learning and growth*.

Peta strategi tersebut terdiri dari 8 (delapan) sasaran strategis. 1 (satu) sasaran strategis pada *stakeholder perspective*, 2 (dua) sasaran pada *customer perspective*, 2 (dua) sasaran pada *internal process* serta 3 (tiga) sasaran pada *learning and growth perspective*.

Sasaran-sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Proaktif, adaptif, dan Terpercaya; (2) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal; (3) Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Kebutuhan Pengguna Jasa; (4) Penerapan Tata Kelola Aset yang Efektif; (5) Pelayanan Piutang Negara, Penilaian dan Lelang yang Profesional dan Produktif; (6) Pengelolaan Keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang efektif; (7) Penanganan Hukum dan Komunikasi Publik yang Efektif; (8) Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen resiko yang efektif.

Pada tahun 2025 ini dihasilkan 18 IKU pada level UPK- Three yang merupakan kontrak kinerja antara Kepala KPKNL Bontang dengan Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara.

Secara umum, pencapaian IKU pada tahun 2025 melampaui target yang ditetapkan. **Pencapaian IKU KPKNL Bontang terdiri dari 18 IKU berstatus hijau, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,63% predikat Istimewa.**

Pada Tahun 2025 ini juga, KPKNL Bontang berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Mahakam Treasury Award Semester I Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Samarinda. Dalam acara tersebut, KPKNL Bontang meraih dua penghargaan sekaligus, yakni Satuan Kerja dengan Nilai 100 atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Satuan Kerja dengan IPA dan Dukungan Digitalisasi Terbaik untuk periode Semester I Tahun 2025. Selain itu, pada Tahun 2025, KPKNL Penghargaan Kategori Platinum sebagai kantor yang telah memenuhi syarat dalam penerapan Gedung Kantor Ramah Lingkungan di Lingkungan Kementerian Keuangan.



Predikat NKO:
 a. NKO > 100 = Istimewa
 b. 90 ≤ NKO ≤ 100 = Baik
 c. 70 ≤ NKO < 90 = Butuh Perbaikan
 d. 50 ≤ NKO < 70 = Kurang
 e. NKO < 50 = Sangat Kurang

Untuk meningkatkan kepercayaan *stakeholders*, KPKNL Bontang berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan kualitas manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja melalui Pelaksanaan Monev Keberlanjutan ZI WBBM sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat. Disamping itu, kegiatan Dialog Kinerja Organisasi dan Pemantauan Risiko Organisasi juga konsisten dilakukan per tiap triwulan sebagai upaya maksimal dalam penggalian *early warning system* dalam memitigasi risiko bisnis.

Selanjutnya, berbagai pencapaian kinerja tahun 2025 tidak terlepas dari penguatan serta peningkatan sumber daya secara konsisten, diantaranya SDM yang kompeten, berintegritas, penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif, dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi. Seluruh jajaran KPKNL Bontang juga harus meningkatkan dan menyempurnakan kinerja, serta terus-menerus mengupayakan perbaikan.

Pada Tahun 2026, KPKNL Bontang telah merumuskan rencana kerja yang akan dicapai dan telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala KPKNL Bontang Tahun 2026 yang memuat 19 IKU dari 8 Sasaran Strategis.



01.

Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
- C. Peran Strategis
- D. Sistemanka

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPKNL Bontang merupakan instansi vertikal di lingkungan DJKN, Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Sebagai instansi vertikal, KPKNL Bontang dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2025. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.01/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Fungsi KPKNL

- a) inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b) registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c) pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara; pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
- d) pelaksanaan pelayanan penilaian;
- e) pelaksanaan pelayanan lelang;
- f) penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian dan lelang;
- g) pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
- h) verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan pelaksanaan administrasi KPKNL.

Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi KPKNL, terdapat subbagian, seksi serta jabatan fungsional yang memiliki tanggungjawab berbeda-beda. Struktur organisasi pada KPKNL Bontang terdiri atas :

- a. Subbagian Umum
Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/kekayaan negara.
- c. Seksi Piutang Negara
Mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.
- d. Seksi Hukum dan Informasi
Mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
- e. Seksi Kepatuhan Internal
Mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- f. Jabatan Fungsional Pelelang
Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang Eksekusi, Lelang Non Eksekusi Wajib dan Lelang Non Eksekusi Sukarela.
- g. Jabatan Fungsional Penilai
Jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/ atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Secara keseluruhan, jumlah pegawai KPKNL Bontang per 31 Desember 2025 sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, dan belum ada pegawai yang tergolong pegawai berkebutuhan khusus.

Komposisi pegawai KPKNL Bontang berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, umur dan jenis kelamin adalah sebagai berikut :

a. Komposisi pegawai berdasarkan pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
Diploma III	5
Diploma IV/ S I	12
S II	5
TOTAL	22

b. Komposisi pegawai berdasarkan usia

Tingkat Kelompok Usia	Jumlah Pegawai
21-30	4
31-40	13
41-50	4
50-58	1
TOTAL	22

c. Komposisi pegawai berdasarkan generasi

Jenis Generasi	Jumlah Pegawai
Gen Z (1997-2012)	4
Millenial (1981-1996)	14

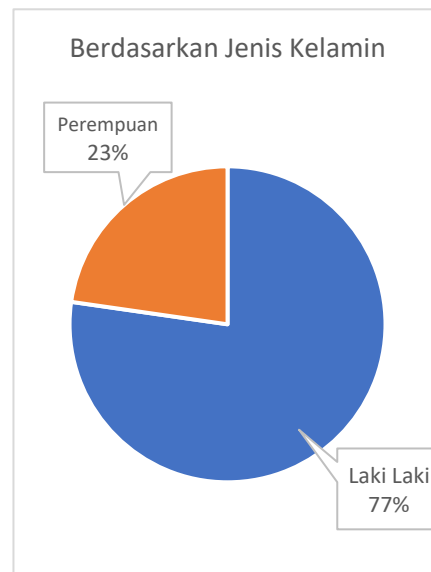
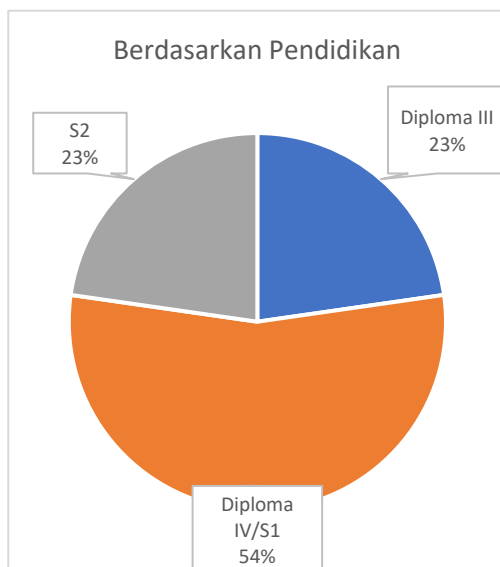
Gen X (1965-1980)	4
TOTAL	22

d. Komposisi pegawai berdasarkan Jabatan

Jabatan	Jumlah Pegawai
Pejabat Administrator	1
Pejabat Pengawas	5
Pelelang Ahli Muda	2
Pelelang Ahli Pertama	1
Penilai Ahli Pertama	2
Pelaksana	11
TOTAL	22

e. Komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
Laki Laki	17
Wanita	5
TOTAL	22



C. PERAN STRATEGIS

Pada Tahun 2025, KPKNL Bontang mendapat kan penugasan berupa kegiatan Inventarisasi dan Penilaian Tanah Hak Pengelolaan Tanah Transmigran dalam Penguasaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK yang menyatakan perlu adanya pencatatan HPL sebagai aset tanah pada Kementerian Transmigrasi. Dari total 66.373 Ha Tanah, 33.886 Ha (terdiri dari 65 bidang) berada di wilayah kerja KPKNL Bontang.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja KPKNL Bontang Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif
Bagian ini menguraikan rangkuman atas keseluruhan isi dari Laporan Kinerja terutama atas capaian kinerja dan penghargaan yang diperoleh pada tahun 2025 serta harapan atau sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2026
2. Bab I. Pendahuluan
Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, meliputi landasan penyusunan laporan kinerja, tugas, fungsi dan struktur organisasi.
3. Bab II. Perencanaan Kinerja
Bagian ini menguraikan tentang perencanaan strategis, penyusunan perjanjian kinerja Tahun 2025, penyusunan perjanjian kinerja Tahun 2026
4. Bab III. Akuntabilitas Kinerja
Bagian ini menguraikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPKNL Bontang, realisasi anggaran yang digunakan, efisiensi penggunaan sumber daya , *achievement* yang diperoleh KPKNL Bontang, serta Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja yang telah dilakukan oleh KPKNL Bontang.
5. Bab IV. Penutup
Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



02.

Rencana Kinerja

- A. Rencana Strategis
- B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- C. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan dimana berada. Dalam mengemban tugas dan fungsi, Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan visi dan misi Kantor Pusat DJKN serta KPKNL yang berada dibawah Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, yang merupakan kristalisasi dari semangat dan sekaligus menjadi komitmen seluruh jajaran DJKN, yaitu:

” Menjadi pengelola kekayaan negara, penilaian, dan lelang yang akuntabel, produktif, dan inovatif dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan”

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial
2. Mewujudkan layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara
3. Mewujudkan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum
4. Mewujudkan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima dalam kerangka budaya Kemenkeu Satu.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Terdapat 4 (empat) tujuan yang hendak dicapai oleh DJKN untuk periode 2025-2029, yaitu:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial.
2. Layanan penilaian dan advisori yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara.
3. Layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum.
4. Pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, DJKN mempunyai sasaran strategis yang ditetapkan. Sasaran strategis merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Sesuai

dengan Renstra DJKN Tahun 2020-2024, sasaran strategis DJKN yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial adalah pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan investasi yang optimal dan mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial, dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Pengelolaan Barang Milik Negara yang optimal dan akuntabel dalam mendukung program pembangunan nasional
 - b. Pengelolaan kekayaan negara lain-lain yang akuntabel
 - c. Pengelolaan investasi pemerintah yang akuntabel dan efektif untuk mendorong perekonomian dan pembangunan nasional
 - d. Pengelolaan piutang negara yang akuntabel dan efektif dalam menjamin hak tagih negara
 - e. Peningkatan sinergi pengelolaan aset pemerintah pusat dan pemerintah daerah
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan layanan penilaian dan advisory yang profesional dan relevan untuk kepentingan negara adalah layanan penilaian dan advisory yang profesional dan relevan, dengan arah kebijakan yaitu penguatan peran strategis layanan penilaian dan advisory untuk kepentingan pemerintah pusat dan daerah.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan layanan lelang yang modern dan terpercaya untuk mendukung perekonomian nasional dan penegakan hukum adalah layanan lelang yang modern dan terpercaya, dengan arah kebijakan yaitu layanan lelang yang efektif, efisien, inklusif, dan kredibel guna menggerakkan perekonomian nasional.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif untuk mewujudkan layanan prima adalah pengelolaan sumber daya organisasi dan teknologi informasi yang adaptif dan inovatif, dengan arah kebijakan yaitu:
 - a. Organisasi dan SDM yang optimal
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah

B. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Penetapan/perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Sementara itu dokumen Penetapan Kinerja/perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Penetapan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor KPKNL Bontang Nomor PK-04/WKN.13/2025 tanggal 30 Januari 2025 yang telah diubah sesuai dokumen Adendum Perjanjian Kinerja

Nomor 04A/WKN.13/2025 tanggal 1 Oktober 2025 Addendum atas perjanjian kinerja yang dilakukan meliputi:

a. Perubahan Indikator Kinerja Utama

Perubahan terjadi pada Raw Data IKU Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara. Setelah dilakukan addendum, target penurunan nilai saldo piutang negara yang sebelumnya 100% (Rp 70 juta) menjadi 100% (Rp161 Juta).

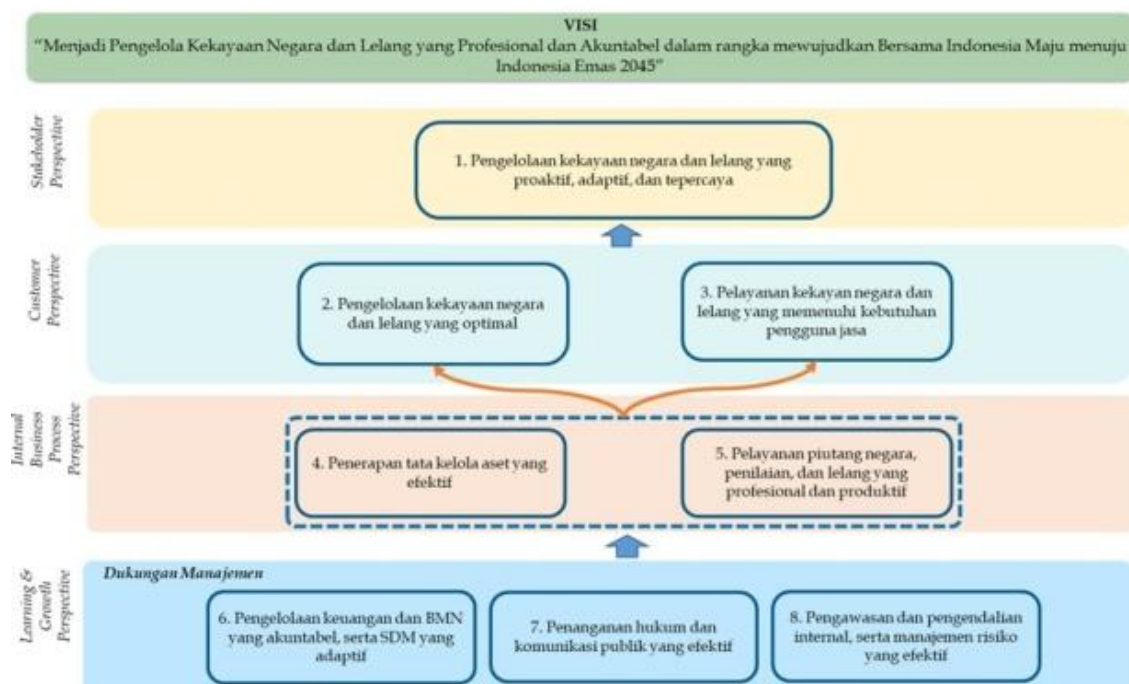
b. Perubahan Rincian Target Kinerja

Rincian target per triwulan atas IKU tersebut tidak mengalami perubahan mengingat perubahan hanya terdapat pada raw data, sehingga rincian target per triwulan tetap sesuai dengan sebelemu addendum.

Dengan berubahnya IKU Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara, Rincian target per triwulan atas IKU tersebut juga mengalami addendum.

Kode IKU	IKU	Target						
		Q1	Q2	s.d. Q2	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
2a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis KPKNL Bontang termuat dalam Peta Strategi Bontang yang menerapkan 4 perspektif, yaitu : *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. *Stakeholders perspective* berisi hal-hal yang harus dihasilkan oleh organisasi agar dinilai berhasil oleh stakeholder. *Customer perspective* berisi ekspektasi dari customer dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. *Internal process perspective* berisi proses bisnis seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan atas pelayanan yang dilaksanakan. Sedangkan *learning and growth perspective* berisi sumber daya internal yang dimiliki untuk melakukan perbaikan dan perubahan sehingga dapat menghasilkan pelayanan yang diharapkan.



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1a-CP	Indeks integritas	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (9,054 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100% (133,1 M)
		2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (70 Jt)
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (7 Berkas)
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

Dari Kinerja Utama (IKU) yang diidentifikasi sebanyak 18 (delapan belas) IKU. Selanjutnya, keterkaitan antara sasaran strategis dan IKU disajikan dalam tabel berikut:

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja tahun 2025, KPKNL Bontang berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%;
2. Indeks capaian IKU dihitung berdasarkan formula sesuai dengan jenis polarisasi IKU;
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU;

Peta Strategi tersebut dikembangkan delapan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target;

4. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak memenuhi target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase pencapaian target indikator kinerja di KPKNL Bontang, yaitu:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

IKU yang memiliki polarisasi maximize, merupakan indikator kinerja yang menunjukkan ekspektasi arah pencapaian indikator kinerja lebih tinggi dari nilai target yang ditetapkan.

ALIGNMENT RENSTRA-RENJA DAN KK

ALIGNMENT RENSTRA-RENJA DAN PERJANJIAN KINERJA KPKNL BONTANG TAHUN 2025								
No	Rencana Strategis DJKN 2025-2029		Rencana Strategis Kemenkeu 2025-2029 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.01/2025		Rencana Kerja Kementerian Keuangan (DJKN) Tahun 2025		Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Target Kinerja pada PK KPKNL Bontang	
	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target	Indikator Kinerja	Target
1	Indeks Integritas	100	Indeks Integritas	100	Indeks Integritas Organisasi	100	Indeks integritas	100
2	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100	Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100% (9,054 M)

3	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara	100	Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	100%
4	Persentase realisasi pokok lelang	100	Persentase realisasi pokok lelang	100%	-	-	Persentase realisasi pokok lelang	100% (133,1 M)
5	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100	Persentase realisasi penurunan saldo piutang negara	100%	-	-	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (161 M)
6	-	-	-	-	-	-	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
7	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,20 (Skala 5)	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	4,20 (Skala 5)	Tingkat kepuasan stakeholders dan pengguna layanan	100	Indeks kepuasan pengguna layanan	77
8	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	100	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan	100%	-	-	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
9	-	-	-	-	-	-	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%

10	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100	-	-	-	-	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (7 berkas)
11	Tingkat kualitas layanan penilaian	70	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	-	-	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
12	Persentase produktivitas lelang	80	-	-	-	-	Persentase produktivitas lelang	80%
13	-	-	Indeks Kinerja Anggaran Kementerian Keuangan	100	-	-	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
14	-	-	Indeks kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	84,1	-	-	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
15	-	-	-	-	-	-	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
16	-	-	-	100	-	-	Indeks penanganan permasalahan hukum	100
17	-	-	-	-	-	-	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
18	-	-	-	-	-	-	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

C. PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 pada KPKNL Bontang mengacu pada Perjanjian Kinerja Dirjen Kekayaan Negara, yang telah dilakukan penyelarasan dengan Perjanjian Kinerja Kementerian Keuangan, Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 – 2029, serta Rencana Strategis DJKN Tahun 2025 – 2029, yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 serta visi dan misi presiden.

Detail lebih lanjut keterkaitan antara Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 – 2029, dengan RPJMN 2025 - 2029 serta visi dan misi Presiden dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 – 2029.

Adapun Perjanjian Kinerja KPKNL Bontang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator		Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang produktif dan kredibel	1a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan	100
		1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (Rp7,4 M)
2	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna layanan	2a-CP	Persentase akurasi data IGT peta BMN berupa tanah	100
		2b-N	Tingkat efektivitas pembinaan	80%
3	Pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efektif	3a-	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (Rp50 Jt)
		3b-CP	Persentase realisasi kinerja lelang	100% (Rp25 M)
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		4b-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4c-N	Persentase Evaluasi Kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%
		5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	80%
		5c-CP	Persentase produktivitas lelang	85%
6	Pengelolaan SDM yang adaptif, keuangan yang akuntabel, dan BMN yang produktif.	6a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100%
		6b-N	Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6d-N	Indeks pengelolaan kearsipan	80

7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP	Indeks efektivitas komunikasi publik	80
		7	Indeks penanganan permasalahan hukum	80
8	Pengawasan, pengendalian internal, dan manajemen risiko yang efektif	8a-N	Indeks integritas organisasi	100
		8b-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan risiko	83



03.

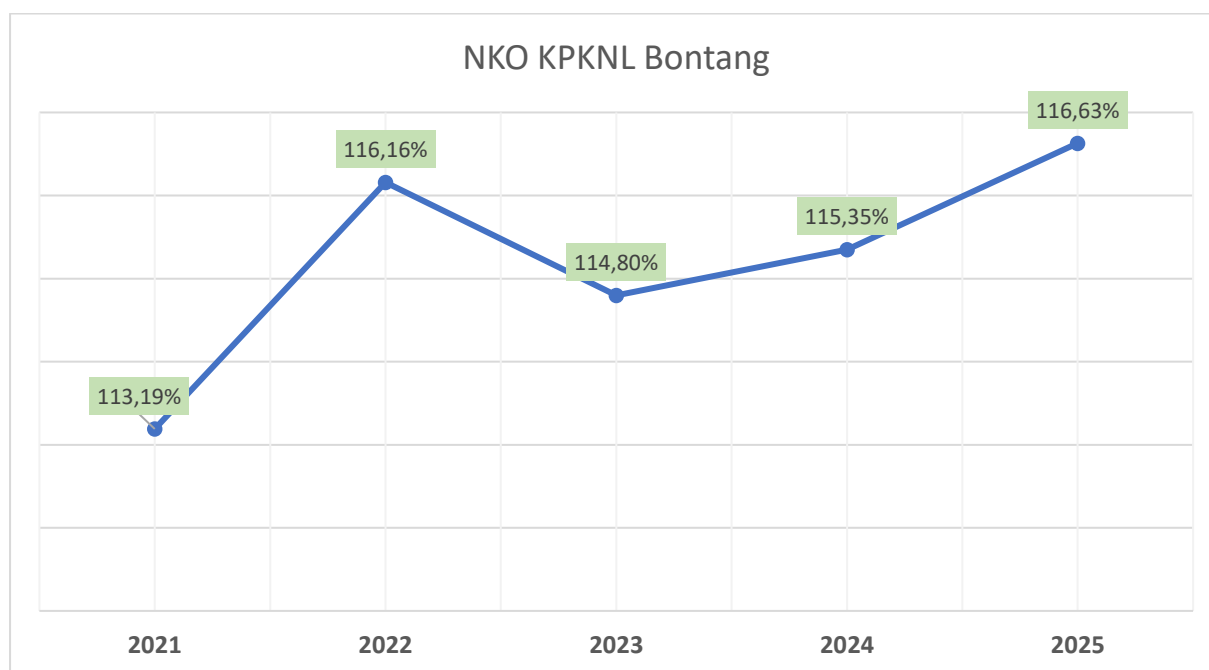
Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisas Anggaran
- C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- E. Kinerja Lain-Lain

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dalam lima tahun terakhir, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh KPKNL Bontang menunjukkan hasil yang cukup stabil. Selama tahun 2021-2025, perolehan NKO rata-rata dalam lima tahun terakhir sebesar 115,22%. Hal ini menunjukkan, perolehan NKO KPKNL Bontang selalu mendapat predikat “Istimewa” berdasar pada penetapan sebaran predikat kinerja.



NKO terkecil yang diperoleh KPKNL Bontang terjadi di Tahun 2021 sebesar 113.19%. Hal ini disebabkan karena masih pemulihan pasca pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang melemahkan semua sektor global. Sedangkan NKO tertinggi dalam lima tahun terakhir, diperoleh pada Tahun 2025 sebesar 116,63%.

Penjelasan Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Bontang selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. .

Tahun	Sasaran Strategis	IKU Kemenkeu Three	NKO	Keterangan (IKU Implementasi yang tidak memenuhi target)
2021	10	22	113,19%	IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi sebesar 91,44% dari target sebesar 95,5%

2022	11	20	116,16%	IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi sebesar 92,20% dari target sebesar 95,5%
2023	10	20	114,80%	IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan realisasi sebesar 97,99% dari target sebesar 100%
2024	11	20	115,35%	Semua IKU tercapai memenuhi target, bahkan Sebagian besar melebihi target
2025	8	18	116,63%	Semua IKU tercapai memenuhi target, bahkan Sebagian besar melebihi target

NKO KPKNL Bontang di Tahun 2025 sebesar 116,63% mengalami kenaikan sebesar 1,28% dibanding tahun sebelumnya. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing perspektif. *Stakeholder perspective* dengan bobot 30%, *customer perspective* dengan bobot 20%, *internal business process* dengan bobot 25% dan *learning and growth* dengan bobot 25%.

Di tahun 2025, KPKNL Bontang memiliki capaian 18 IKU berstatus hijau. Penjelasan capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Indeks Integritas

Penilaian integritas adalah penilaian yang dilakukan kepada suatu insititusi dengan mengkombinasikan pendekatan persepsi dan pengalaman baik secara langsung maupun tidak langsung dan diwakili oleh pegawai/pejabat publik dalam melaksanakan tugas secara transparan, akuntabel, dan antikorupsi serta diwakili oleh pengguna layanan dan rekanan suatu institusi. Periode Penilaian dibatasi atas kejadian/peristiwa/persepsi Integritas selama 12 bulan ke belakang dari pelaksanaan SPI dengan responden terdiri dari:

- Internal : Pegawai Kemenkeu, dengan kriteria ASN Masa Kerja Minimal dalam kurun waktu 12 bulan pada unit sampel.
- Eksternal : Pengguna Layanan dan Rekanan, dengan Kriteria Pengguna Layanan dalam kurun waktu pada unit sampel 12 bulan.

Capaian IKU ini diberikan langsung oleh Inspektorat Jenderal Kemenkeu RI. Hasil capaian IKU Indeks Integritas periode triwulan IV tahun 2025 untuk seluruh unit kerja DJKN adalah sebesar 105,29% (mengalami peningkatan 1,62 poin dibandingkan tahun 2024 sebesar 103,67%).

KPKNL Bontang	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	1a-CP Indeks Integritas							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	100	100	100	120	120	105,29	105,29	
Capaian	100%	100%	100%	120%	120%	105,29%	105,29%	
Nilai Kinerja	100%	100%	100%	120%	120%	105,29%	105,29%	

Dalam mendukung capaian IKU, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan KPKNL Bontang meliputi.

- 1) pelaksanaan kegiatan terkait kerangka integritas sesuai jadwal dan arahan dari kantor pusat.
- 2) pelaksanaan pemantauan pengendalian utama, pemantauan kode etik dan perilaku serta pemantauan pengaduan masyarakat.
- 3) pelaksanaan internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan di lingkup KPKNL Bontang;
- 4) pembuatan pakta integritas untuk perjalanan dinas.

2. Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang

Target penerimaan negara yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang pada Tahun 2025 sebesar Rp9.054.180.000,00 dengan realisasi sebesar Rp11.370.547.550,00. Adapun rinciannya sebagai berikut.

a. PNBP dari Pengelolaan BMN

PNBP Pengelolaan BMN dengan target sebesar Rp6.000.000.000,00 berhasil tercapai sebesar Rp7.343.505.322,00.

Detail capaian PNBP Pengelolaan Kekayaan Negara sebagai berikut:

- Penjualan Barang Rampasan/hasil sitaan 57,50% atau sebesar Rp4.222.531.235,-
- BLU Lainnya 18,39% atau sebesar Rp1.350.279.333,-
- Pemindahtanganan/Penjualan BMN 13,31% atau sebesar Rp977.274.897,-
- Pemanfaatan/Sewa BMN 10,80% atau sebesar Rp793.419.857,-

KPKNL Bontang	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang – PNBP BMN							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	174,76%	157,77%	157,77%	132,41%	132,41%	122,39%	122,39%	
Capaian	174,76%	157,77%	157,77%	132,41%	132,41%	122,39%	122,39%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU, KPKNL Bontang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) berkoordinasi dan mendorong satker untuk melakukan optimalisasi pengelolaan BMN terutama melalui pemanfaatan BMN yang belum digunakan sesuai tuisi.
- 2) berkoordinasi dan mendorong satker untuk mengajukan penghapusan BMN kondisi rusak berat melalui penjualan Lelang.
- 3) berkoordinasi dengan KPPN Samarinda dan Tanjung Redeb untuk mendapatkan data realisasi PNBP

b. PNBP dari Pengurusan Piutang Negara/Daerah

PNBP Piutang Negara dengan target sebesar Rp1.750.000 dan capaian sebesar Rp14.494.454,00. PNBP ini berasal dari pengurusan piutang negara berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara yang diupayakan oleh KPKNL. Selama tahun 2025, terjadi pelonjakan penerimaan PNBP Piutang Negara yang cukup signifikan. Lonjakan PNBP terjadi akibat penyelesaian BKPN yang baru diserahkan pada tahun 2024, meliputi piutang dari aset kredit eks BPPN sebesar Rp9.590.000,00 dan angsuran atas piutang PT Faza Jaya Pratama sebesar Rp2.000.000,00. Sementara capaian PNBP lainnya merupakan realisasi dari upaya penagihan BKPN tahun-tahun sebelumnya.

KPKNL Bontang	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang – PNBP Piutang							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Realisasi	420,16%	1519,20%	1519,20%	1103,86%	1103,86%	828,25%	828,25%	MAX/ TLK
Capaian	420,16%	1519,20%	1519,20%	1103,86%	1103,86%	828,25%	828,25%	
Nilai	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Kinerja								

Dalam pencapaian target IKU, KPKNL Bontang melakukan upaya penagihan langsung ke Debitur meskipun lokasi tempat tinggal debitur yang cukup jauh dari Kota Bontang. Selain itu, KPKNL Bontang terus melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait Pengurusan Piutang kepada Penyerah Piutang di wilayah Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.

c. PNBP dari Lelang

PNBP Lelang dengan target sebesar Rp3.052.430.000,00 dengan capaian sebesar Rp4.012.547.774,00. Capaian PNBP Lelang dilihat dari capaian PNBP Pejabat Lelang Kelas I dan capaian lelang pegadaian. Adapun di tahun 2025, capaian PNBP lelang Pejabat Lelang Kelas I berhasil tercapai sebesar Rp1.527.495.807,00

KPKNL Bontang	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
	1b-CP Persentase Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang – PNBP Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	212,73%	100,47%	100,47%	76,64%	76,64%	104,17%	104,17%	
Capaian	212,73%	100,47%	100,47%	76,64%	76,64%	104,17%	104,17%	
Nilai Kinerja	120%	100,47%	100,47%	76,64%	76,64%	104,17%	104,17%	

Penyumbang PNPB lelang PL I terbesar selama tahun 2025 jika dilihat dari jenis lelangnya adalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, diikuti Lelang Non Eksekusi Wajib BMN dan Lelang Non Eksekusi Wajib BMD.

Nilai hasil pelayanan Lelang yang diupayakan oleh KPKNL dirangkum sebagai berikut.

Bea Lelang Laku	Rp3.946.720.540,00
Bea Permohonan Lelang	Rp60.150.000,00
Uang Jaminan Lelang Wanprestasi	Rp5.677.234,00
TOTAL	Rp4.012.547.774,00

Dalam pencapaian target IKU, KPKNL Bontang telah melakukan koordinasi dan penggalan potensi Lelang pada perbankan, pemerintah daerah dan lembaga lainnya. Untuk menarik minat masyarakat dalam mengikuti lelang sekaligus memperkenalkan lelang.go.id, KPKNL Bontang melaksanakan kegiatan SOLID (Sosialisasi dan Edukasi Lelang) yang dikemas dalam bentuk pameran kecil serta simulasi lelang baik offline maupun online yang dilaksanakan saat acara Sunday Market di Kota Bontang. Antusiasme dan minat masyarakat sangat baik, terlihat dari banyaknya masyarakat yang membuat akun lelang saat kegiatan tersebut berlangsung.

3. Tingkat Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara

IKU ini mengukur kesesuaian BMN pada Satker dengan ketentuan SBSK. Target kegiatan, yang merupakan BMN jenis target yang hasil pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK-nya < 50 %. Target optimalisasi BMN pada KPKNL Bontang tahun 2025 sebanyak 26 NUP dengan rincian 19 NUP Tanah Bangunan Kantor, 4 NUP Bangunan Gedung Kantor, tidak ada NUP Tanah Rumah Negara dan 3 NUP Tanah Mess/ Asrama.

Capaian atas IKU telah maksimal. Pada Triwulan IV Tahun 2025 terdapat 23 NUP capaian optimalisasi yang meliputi sewa tanah dan/atau bangunan serta optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan BMN. Objek optimalisasi antara lain berada pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama di Bontang dan Sangatta, Polres Bontang dan Polres Kutai Timur, serta beberapa satuan kerja lainnya seperti KPKNL Bontang, BPS Bontang, KSOP Kelas II Bontang, dan Balai Taman Nasional Kutai. Sebagian objek masih menggunakan bangunan milik Pemda yang belum dihibahkan serta dilengkapi dengan surat keterangan penggunaan tanah.

KPKNL Bontang	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	30%	50%	50%	60%	60%	71,5%	71,5%	MAX/ TLK
Realisasi	30%	97,55%	97,55%	85,39%	85,39%	81,78%	81,78%	
Capaian	100%	195,10%	195,10%	142,31%	142,31%	114,37%	114,37%	
Nilai Kinerja	100%	120%	120%	120%	120%	114,37%	114,37%	

Dalam pencapaian target IKU, KPKNL Bontang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) Melakukan kegiatan coaching clinic pengelolaan BMN secara rutin dengan satker-satker di wilayah kerja KPKNL Bontang.
- 2) Melakukan monitoring dan koordinasi terhadap tindak lanjut dari hasil rekomendasi kegiatan coaching clinic pengelolaan BMN.
- 3) Koordinasi dengan Kanwil DJKN Kaltimara guna bersinergi dengan satker korwil untuk mendorong satker-satker di bawahnya mengoptimalkan penggunaan BMN terutama yang nilai SBSKnya dibawah 50%.
- 4) Mendorong satuan kerja objek optimalisasi BMN di wilayah kota Bontang untuk mengajukan permohonan pemanfaatan di atas aset tersebut serta mengajukan permohonan perubahan objek target optimalisasi kepada Kanwil DJKN Kaltimara.

4. Persentase Realisasi Pokok Lelang

Persentase hasil lelang (pokok lelang) diperoleh dari realisasi jumlah pokok lelang terhadap target. Pokok lelang adalah harga lelang yang belum termasuk bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara eksklusif atau harga lelang dikurangi bea lelang pembeli dalam lelang yang diselenggarakan dengan penawaran harga secara inklusif.

IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang ini memperhitungkan (Jumlah Realisasi Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PL II) / (Target Pokok Lelang KPKNL (PL I) + Pegadaian + Pokok Lelang PLII). IKU ini bertujuan agar Lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif.

IKU presentase realisasi pokok lelang berhasil direalisasikan sebesar 121,14% dari target 100%.

KPKNL Bontang	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Optimal							
	2b-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	426,50%	196,69%	196,69%	138,15%	138,15%	121,14%	121,14%	
Capaian	426,50%	196,69%	196,69%	138,15%	138,15%	121,14%	121,14%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Realisasi pokok lelang tahun 2025 adalah sebesar Rp161.249.443.594,00 dari target sebesar Rp133.110.500.000. Realisasi pokok lelang untuk lelang yang dilaksanakan oleh Jabatan Fungsional Pelelang adalah sebesar Rp40.011.855.294,00 dan realisasi pokok lelang pegadaian sebesar Rp121.237.588.300,00.

Keterangan	Target	Realisasi	Capaian
Pokok Lelang PL Kelas I	Rp28.000.000.000,00	Rp40.011.855.294,00	142,90%
Pokok Lelang Pegadaian	Rp121.237.588.300,00	Rp105.110.500.000,00	115,34%
Jumlah	Rp133.110.500.000,00	Rp161.249.443.594,00	121,14%

Penyumbang pokok lelang PL I terbesar berasal dari permohonan lelang PT Bank Muamalat Indonesia yang mencapai 20,75% dari keseluruhan.

Dalam memenuhi pencapaian target, KPKNL Bontang telah melakukan upaya maksimal sebagai berikut.

- 1) koordinasi rutin dan penggalan potensi lelang kepada perbankan, pemda dan instansi lainnya
- 2) proaktif dalam melakukan penggalan potensi lelang sukarela
- 3) pelaksanaan sosialisasi lelang hak menikmati dan sukarela

5. Persentase Realisasi Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara

Persentase Jumlah Penurunan Nilai Saldo Piutang Negara menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara terhadap BKPN lama. Kriteria pengakuan capaian atas IKU yaitu untuk seluruh BKPN yang ada pada aplikasi FocusPN, dengan komponen:

IKU presentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara berhasil direalisasikan sebesar 106,69% dari target 100%.Capaian penurunan nilai saldo Piutang Negara pada tahun 2025 adalah sebesar Rp172.705.237 dari target sebesar Rp161.878.000.

KPKNL Bontang	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
	2c-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Poi/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	197,51%	408,07%	408,07%	269,80%	269,80%	106,69%	106,69%	
Capaian	197,51%	408,07%	408,07%	269,80%	269,80%	106,69%	106,69%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	106,69%	106,69%	

Target IKU Penurunan Outstanding Piutang Negara berhasil dicapai dengan sangat baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain.

- 1) melakukan penagihan langsung ke debitur.
- 2) melakukan koordinasi dan penggalan BKPN kepada Penyerah Piutang di Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau.

6. Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi

IKU ini untuk mengukur efektifitas edukasi dan komunikasi yang dilakukan oleh Pelelang dan Seksi Piutang Negara terhadap pengguna jasanya.

KPKNL Bontang	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							
	3a-CP Indeks Efektifitas Edukasi dan Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Poi/KP
Target	74	74	74	74	74	74	74	MAX/ TLK
Realisasi	120	100,18	100,18	105,94	105,94	100,40	100,40	

Capaian	162,16%	135,38%	135,38%	143,16%	143,16%	135,68%	135,68%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Target IKU Efektifitas Edukasi dan Komunikasi berhasil dicapai dengan sangat baik karena beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain yaitu pemberian Edukasi dan Sosialisasi kepada stakeholder maupun mitra dalam pelaksanaan lelang dan piutang negara. Edukasi dilaksanakan secara berkala baik dalam bentuk kegiatan sosialisasi maupun Diskusi dengan mitra/stakeholder.

7. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan

IKU ini untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan KPKNL atas layanan yang diberikan oleh KPKNL Bontang. Survey dilakukan secara elektronik melalui E-SKPL. Periode Triwulan IV Tahun 2025, KPKNL Bontang mendapat nilai sebesar 95,90 berdasarkan hasil survey yang telah diisi oleh pengguna layanan. Dengan target sebesar 77, maka capaian Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 120%.

KPKNL Bontang	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi harapan pengguna jasa							Pol/KP
	3b-N Indeks Kepuasan Pengguna Layanan							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	MAX/TLK
Target	77	77	77	77	77	77	77	
Realisasi	95	95,40	95,40	94,60	94,60	95,90	95,90	
Capaian	123,38%	123,90%	123,90%	122,86%	122,86%	124,55%	124,55%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KPKNL Bontang meliputi:

- Memberikan layanan prima terhadap semua jenis layanan
- Memberikan percepatan terhadap beberapa standar layanan dari segi norma waktu
- Memfasilitasi pelatihan service excellent kepada seluruh pegawai dengan mengundang narasumber dari perbankan sebagai bagian dari peningkatan pelayanan.
- Evaluasi atas hasil survey SKPL dilaksanakan secara berkala setiap triwulan.

8. Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan

Berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, seluruh Barang Milik Negara/Daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Pusat/Daerah harus disertipikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Selanjutnya, ketentuan ini ditegaskan kembali dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Sebagai tindak lanjut peraturan dimaksud maka juga diterbitkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BPN Nomor 186/PMK.06/2009 dan Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah.

Dalam pelaksanaan pensertipikatan BMN berupa tanah pada tahun 2025 bidang tanah objek target dikelompokkan dalam beberapa kelompok yaitu:

- K1 : Clean and clear (data fisik dan yuridis lengkap dan tidak ada permasalahan hukum)
- K2 : Not Clean But Clear (data fisik dan data yuridis tidak lengkap namun tidak sengketa/berperkara)
- K3 : Clean But Not Clear (data fisik dan data yuridis lengkap sengketa/berperkara)
- K4 : Sudah bersertipikat namun belum diupdate pada master aplikasi SIMAN

Total target bidang tanah semua kategori (K1 s.d. K4) pada KPKNL Bontang pada tahun 2025 sebanyak 57 NUP atau 55 bidang dan 1 Bidang tanah KKKS, dengan total capaian sebanyak 73 Bidang. Rincian Target dan capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Kategori	Target		Capaian	
	NUP	Bidang	NUP	Bidang
K1	1	1	13	15
K2	-	-	-	-
K3	56	54	56	58
K4	-	-	-	-
TOTAL	57	55	69	73

IKU ini berhasil direalisasikan dengan nilai akhir sebesar 132,73%.

KPKNL Bontang	Penerapan tata Kelola aset yang efektif							Pol/KP
	4a-CP Presentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
Target	5%	40%	40%	60%	60%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	10,91%	83,64%	83,64%	85,45%	85,45%	132,73%	132,73%	
Capaian	218,2%	209,1%	209,1%	142,42%	142,42%	132,73%	132,73%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU, KPKNL Bontang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) melakukan koordinasi dengan satker dan BPN setempat terkait pelaksanaan sertipikasi;
- 2) melakukan rapat monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertipikasi tanah secara rutin dengan pihak kantor pertanahan dan satker;
- 3) melakukan sosialisasi secara luring dan daring dengan menggandeng ATR/BPN Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau sebagai narasumber teknis pendaftaran sertipikasi tanah pemerintah.

9. Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

Kinerja aset BMN diukur secara sistematis dan terukur dengan mempertimbangkan 6 indikator yang meliputi:

- a. kepentingan umum;
- b. manfaat sosial;
- c. kepuasan pengguna;
- d. potensi penggunaan masa mendatang;
- e. kelayakan finansial; dan
- f. kondisi teknis.

IKU ini berhasil direalisasikan dengan nilai akhir sebesar 120%.

KPKNL Bontang	Penerapan tata Kelola aset yang efektif							Pol/KP
	4b-CP Presentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	
Target	15%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	70,81%	91,76%	91,76%	91,76%	91,76%	120%	120%	
Capaian	472,06%	183,52%	183,52%	122,35%	122,35%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

IKU persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) meliputi komponen evaluasi kinerja aset yang disampaikan rekomendasinya tercapai sebanyak 91 NUP dari target 74 NUP dan komponen tindaklanjut rekomendasi tercapai sebanyak 33 NUP dari target 4 NUP.

KPKNL Bontang terus melakukan koordinasi dan pemantauan kepada satker terkait untuk melakukan pengukuran portofolio BMN di wilayah kerjanya.

10. Persentase Realisasi Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)

IKU menggambarkan aspek kinerja pengurusan piutang negara dari sisi penyelesaian BKPN dengan prioritas penyelesaian yang sudah lama pengurusannya di PUPN. Kriteria pengakuan capaian atas masing-masing komponen yaitu penyelesaian BKPN diukur dengan penjumlahan:

- BKPN lunas (SPPNL)
- BKPN penarikan (SPPNS)
- BKPN dikembalikan (SKPBN)
- BKPN Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)
- Koreksi data BKPN

Jumlah saldo BKPN yang terselesaikan di 2025 sebanyak 7 berkas dari total berkas berjumlah 19 berkas. Empat berkas diterbitkan SPPNL dan tiga berkas lainnya diterbitkan PSBDT.

IKU ini berhasil direalisasikan sebesar 115,71% dari target sebesar 100%.

KPKNL Bontang	Pelayanan Piutang Negara, penilaian dan lelang yang professional dan produktif							
	5a-CP Presentase saldo berkas kasus Piutang Negara (BKPN)							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Poi/KP
Target	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	MAX/ TLK
Realisasi	110%	153,33%	153,33%	116%	116%	115,71%	115,71%	
Capaian	110%	153,33%	153,33%	116%	116%	115,71%	115,71%	
Nilai Kinerja	110%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU, KPKNL Bontang telah melakukan koordinasi dengan Penyerah Piutang dan melakukan upaya penagihan langsung, sampai dengan penerbitan surat paksa.

11. Tingkat Kualitas Layanan Penilaian

Penyelesaian layanan penilaian yang tepat waktu dapat mempercepat proses pemberian persetujuan bagi pengguna layanan yang berdampak pada optimalisasi PNBPN. Tingkat kualitas layanan penilaian dihitung berdasarkan aspek norma waktu layanan (40%), akurasi data layanan (30%), dan nilai hasil kaji ulang (30%).

Sepanjang tahun 2025, telah dihasilkan 149 laporan penilaian BMN. Laporan penilaian yang dihasilkan bertujuan untuk penyusunan LKPP, pemanfaatan dan pemindahtanganan.

IKU Tingkat Kualitas Layanan Penilaian berhasil ter-realisis sebesar 111,95% dari target 70%.

KPKNL Bontang	Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang professional dan produktif							
	5b-CP Tingkat Kualitas Layanan Penilaian							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Poi/KP
Target	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%	MAX/ TLK
Realisasi	114,30%	110,50%	110,50%	110,83%	110,83%	112,17%	112,17%	
Capaian	163,28%	157,86%	157,86%	158,32%	158,32%	136,40%	160,24%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai IKU adalah dengan berkoordinasi secara intens dengan pemohon untuk melengkapi kelengkapan dokumen permohonan dan penentuan jadwal survei lapangan. Dalam pencapaian target, Penilai KPKNL Bontang selalu melakukan reuiu terhadap laporan penilaian dan melakukan kaji ulang.

12. Persentase Produktivitas Lelang

IKU ini bertujuan agar lelang semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu media transaksi jual beli yang akuntabel, efisien, dan efektif. IKU ini memperhitungkan antara jumlah lot laku lelang per jenis lelang dengan frekuensi Lelang.

Sepanjang tahun 2025, terdapat 4 (empat) jenis lelang yang telah dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I. Lelang tersebut meliputi, lelang non eksekusi sukarela, lelang non eksekusi wajib, lelang eksekusi hak tanggungan dan lelang eksekusi selain hak tanggungan. Jumlah frekuensi lelang yang telah dilaksanakan sebanyak 384. Dari pelaksanaan tersebut, 72,14% nya TAP (Tidak Ada Penawaran).

Secara keseluruhan, persentase produktivitas lelang ter-realisis sebesar 120% dari target sebesar 80%. IKU ini memperhitungkan dua komponen, yaitu realisasi komponen lelang laku dengan bobot 40% dan komponen frekuensi lelang bobot sebesar 60%.

KPKNL Bontang	Pelayanan piutang negara, penilaian dan lelang yang profesional dan produktif							PoI/KP
	5c-CP Persentase produktivitas lelang							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	MAX/TLK
Target	30%	40%	40%	70%	70%	80%	80%	
Realisasi	50,64%	64,86%	64,86%	94,43%	94,43%	115,57%	115,57%	
Capaian	168,80%	162,15%	162,15%	134,90%	134,90%	144,46%	144,46%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU, KPKNL Bontang telah melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan pemohon lelang, melakukan publikasi info lelang melalui media sosial dan menyampaikan informasi SOP lelang.

13. Indeks Kualitas Kinerja Anggaran

Anggaran yang tersedia pada setiap satuan kerja harus dikelola dengan berkualitas yang ditandai dengan anggaran terserap sesuai rencana yang telah ditetapkan, tercapainya output, efisiensi, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen yang dipakai dalam pengelolaan anggaran adalah DIPA. Sesuai ketentuan yang berlaku, DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pengelolaan belanja. Pada tahun 2025, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang memperoleh alokasi pagu sebesar Rp2.004.835.000,00 (dua milyar empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang tercantum dalam DIPA Nomor SP-DIPA-015.09.2.506370/2025 Tanggal 02 Desember 2024.

Implementasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks Kualitas Kinerja Anggaran bertujuan untuk memastikan anggaran tersebut dikelola dengan baik. Adapun dasar perhitungan IKU Indeks Kinerja Anggaran mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 juncto Peraturan Menteri Keuangan nomor 107 Tahun 2024 pasal 249 ayat (7). Formula perhitungan realisasi IKU Indeks Kinerja Anggaran untuk masing-masing triwulan adalah sebagai berikut.

- Triwulan I dan II = 100% dari nilai IKPA dengan target 95,0
= $\text{Realisasi IKPA} / 95$
- Triwulan III dengan indeks sebagai berikut

Indeks	Kriteria
120	Realisasi IKPA $\geq 98,00$
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi IKPA} - 95) : 0,15 *$ ($95 < x < 98$)

100	Realisasi IKPA = 95
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi IKPA} - 85) : 0,5^{**}$ ($85 < x < 95$)
80	Realisasi IKPA = 85
79.9	Realisasi IKPA < 85

- c. Triwulan IV = 50% x SMART + 50% x IKPA) dengan nilai NKA target 91,0 (Indeks 100), dengan indeks sebagai berikut

Indeks	Kriteria
120	Realisasi NKA $\geq 95,00$
$100 < X < 120$	$100 + (\text{Realisasi} - 91) : 0,2 * (91 < x < 95)$
100	Realisasi NKA = 91
$80 < X < 100$	$80 + (\text{Realisasi NKA} - 80) : 0,55^{**}$ ($80 < x < 91$)
80	Realisasi NKA = 80
79.9	Realisasi NKA < 80

Pada triwulan IV tahun 2025, KPKNL Bontang memperoleh NKA sebesar 100, sehingga berdasarkan tabel di atas hasil konversi realisasi IKU Indeks Kinerja Anggaran mencapai 120. Pada tahun 2025, KPKNL Bontang berhasil mempertahankan angka 120 tersebut sebagaimana capaian tahun 2024 yang mendapatkan indeks capaian 120. Adapun histori indeks capaian IKU Indeks Kinerja Anggaran selama tiga tahun kebelakang adalah sebagai berikut:

Indeks Capaian Tahun 2023			
Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
114,60	114,60	114,60	93,58
Indeks Capaian Tahun 2024			
Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
103,91	98,15	89,72	120
Indeks Capaian Tahun 2025			
Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
120	120	120	120

KPKNL Bontang	Pengelolaan Keuangan dan BMN Yang Akutanbel, serta SDM yang adaptif							
	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	120	120	120	120	120	120	120	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Sejalan dengan ketercapaian IKU Indeks Kinerja Anggaran, terdapat beberapa tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:

- 1) melaksanakan revisi anggaran secara responsif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
- 2) mengoptimalkan capaian output serta memperhatikan batas waktu pengisian pada Aplikasi SAKTI; dan
- 3) menjaga kualitas penyerapan anggaran, pelaksanaan rencana penarikan dana, dan tata kelola UP/TUP/SPM dengan melakukan monitoring secara mingguan.

Selain itu, pada tahun 2025, KPKNL Bontang juga telah menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres1/2025) dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN2025.

14. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Merupakan IKU untuk melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari hasil pelaksanaan Pengadaan.

IKU tercapai dengan perolehan sebesar 120 dari target 100.

KPKNL Bontang	Pengelolaan Keuangan dan BMN Yang Akutanbel, serta SDM yang adaptif							
	6b-CP Indeks tata Kelola pengadaan barang dan jasa							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Poi/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	120	117,14	117,14	120	120	120	120	
Capaian	120%	117,14%	117,14%	120%	120%	120%	120%	
Nilai Kinerja	120%	117,14%	117,14%	120%	120%	120%	120%	

Dalam rangka pencapaian IKU, Upaya yang telah dilakukan antara lain:

1. Penyusunan dan pemutakhiran RUP sebagai implikasi adanya pembukaan blokir di tengah tahun
2. Akselerasi belanja modal melalui e-Purchasing
3. Monitoring dan evaluasi realisasi pengadaan setiap bulan
4. Pemutakhiran realisasi pengadaan pada aplikasi SPSE

15. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

IKU ini bertujuan untuk meningkatkan produktifitas dan efektivitas organisasi melalui pegawai yang berjiwa nasionalisme, berintegritas, unggul dan memiliki kesehatan fisik dan mental yang optimal. SDM dikembangkan melalui pelatihan dan pelaksanaan rencana pengembangan pegawai, serta sebagai pemenuhan kebutuhan pengembangan seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

IKU tercapai dengan perolehan sebesar 120% dari target 80%.

KPKNL Bontang	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang efektif							
	6b-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Poi/KP
Target	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%	MAX/ TLK
Realisasi	37,24%	72,10%	72,10%	85,66%	85,66%	97,46%	97,46%	
Capaian	186,20%	180,25%	180,25%	142,77%	142,77%	121,83%	121,83%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Dalam pencapaian target IKU, KPKNL Bontang telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) menghimbau seluruh pegawai untuk menyusun IDP dan melaksanakan IDP dimaksud.
- 2) menghimbau pegawai untuk mengajukan usulan pelatihan pada Aplikasi Diklat dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai.
- 3) mengkoordinasikan bersama seluruh pegawai terkait pelaksanaan pembinaan mental setiap triwulannya.

16. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum

IKU Indeks penanganan permasalahan hukum untuk mengendalikan kerugian organisasi, diukur melalui 2 (dua) komponen yaitu:

- A. Indeks Penanganan Permasalahan Hukum di Pengadilan (dengan bobot 80%), dan
- B. Indeks Putusan Perkara Berkekuatan Hukum Tetap (dengan bobot 20%)

Pengukuran ketepatan penanganan permasalahan hukum yang dihadapi terkait tugas dan fungsi DJKN, baik litigasi maupun non litigasi. Pengukuran dimulai pada saat Relas Gugatan/Panggilan Sidang diterima oleh DJKN, kemudian sesuai dengan tahapan penanganan hingga permasalahan hukum/perkara dimaksud dinyatakan selesai/berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang *inkracht van gewijsde* artinya terhadap keputusan itu tidak lagi terbuka suatu jalan hukum pada hakim lain atau hakim itu juga untuk mengubah keputusan itu. Klasifikasi putusan perkara yang berkekuatan hukum tetap didasarkan pada akibat hukum yang timbul dari ditetapkannya putusan perkara oleh Majelis Hakim.

Terlaksananya penanganan permasalahan hukum yang optimal serta terselesaikannya permasalahan di bidang hukum yang dihadapi oleh unit organisasi beserta aparatur di dalamnya terkait pelaksanaan tugas dan fungsi merupakan tujuan dari IKU ini.

KPKNL Bontang	Penanganan Hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7a-CP Indeks Penanganan Permasalahan Hukum							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	100	100	100	100	100	100	100	MAX/ TLK
Realisasi	115,69	118,43	118,43	115,16	115,16	116,99	116,99	
Capaian	115,69%	118,43%	118,43%	115,16%	115,16%	116,99%	116,99%	
Nilai Kinerja	115,69%	118,43%	118,43%	115,16%	115,16%	116,99%	116,99%	

Per 31 Desember 2025, terdapat 3 (tiga) perkara aktif di KPKNL Bontang. 2 (dua) perkara menunggu putusan kasasi, dan 2 (dua) perkara dalam tahap pengadilan tingkat pertama. Adapun selama tahun 2025, terdapat 1 perkara yang sudah putusan kasasi menang (*incracht*), dan 2 (dua) perkara yang dicabut.

Untuk memastikan penanganan perkara dapat berjalan dengan baik dan optimal, KPKNL Bontang terus melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pendokumentasian dokumen dan atau produk hukum terkait kegiatan lelang maupun piutang negara, sehingga apabila diperlukan sebagai bukti di pengadilan dapat digunakan dengan baik.
2. Menunjukkan itikad baik, dengan mengikuti seluruh agenda persidangan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
3. Pengembangan kompetensi pegawai penanganan perkara, seperti mengikuti pelatihan penanganan perkara baik yang bersifat e-learning maupun pelatihan jarak jauh.
4. Berkoordinasi dengan Kanwil dan Direktorat Hukum dan Humas, serta Biro Advokasi terkait penanganan perkara.

17. Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID)

IKU ini untuk mengukur ketepatan waktu pemberian layanan informasi publik pada Unit PPID Tk. III/KPKNL, ketepatan dan kelengkapan penyampaian laporan pengelolaan informasi/PPID serta penyediaan data/informasi serta merta, berkala, dan yang harus ada pada website DJKN/KPKNL.

KPKNL Bontang	Penanganan Hukum dan komunikasi publik yang efektif							
	7b-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi (PPID)							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	PoI/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	

Realisasi	115	115	115	115	115	115	115	MAX/ TLK
Capaian	143,75%	143,75%	143,75%	143,75%	143,75%	143,75%	143,75%	
Nilai Kinerja	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Selama Tahun 2025, tidak ada permintaan atas informasi publik. Kendati demikian, Seksi Hukum dan Informasi telah mengupayakan pemberian layanan informasi yang memudahkan para pengguna, seperti :

- 1) Penyediaan form permintaan informasi publik pada Area Pelayanan Terpadu (APT), APT Online maupun pada website.
- 2) Pencatuman daftar informasi publik yang wajib diumumkan, serta merta dan berkala pada website kantor
- 3) Penyematan link proses alur PPID serta form pengajuan layanan informasi public.
- 4) Menetapkan SK Tim PPID Tk. III
- 5) Memberikan tanggapan atas permohonan dari pihak eksternal
- 6) Penyampaian Laporan PPID KPKNL Bontang berkala setiap tahunnya

18. Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko

IKU ini memastikan keberhasilan pencapaian tujuan reformasi birokrasi dan keberhasilan pencapaian perencanaan strategis. Sistem penilaian kinerja sebagai bagian dari sistem pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan serta penilaian kualitas manajemen risiko pada unit organisasi. Review Pengelolaan dilaksanakan dengan melakukan penilaian terhadap empat aspek pengelolaan kinerja, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan/eksekusi, monitoring dan evaluasi serta efektivitas edukasi pengelolaan kinerja.

IKU memperoleh nilai sebesar 115,67% dari target sebesar 85%.

KPKNL Bontang	Pengawasan dan Pengendalian Internal, serta manajemen risiko yang efektif							
	8a-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko							
T/R	Q1	Q2	SM.1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-25	Pol/KP
Target	80	80	80	80	80	80	80	MAX/ TLK
Realisasi	96,40	92,97	92,97	92,97	92,97	95,15	95,15	
Capaian	120,5%	116,21%	116,21%	116,21%	116,21%	118,94%	118,94%	
Nilai Kinerja	120%	116,21%	116,21%	116,21%	116,21%	118,94%	118,94%	

Seksi Kepatuhan Internal terus melakukan monitoring capaian kinerja organisasi maupun risiko serta menyampaikan laporannya secara berkala.

B. REALISASI ANGGARAN

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 KPKNL Bontang dengan nomor DIPA SP-DIPA-015.09.2.506370/2025 Tanggal 02 Desember 2024 mempunyai pagu sebesar Rp2.004.835.000,00 (dua milyar empat juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan akumulasi penyerapan total mencapai 99,23%, dengan rincian sebagai berikut.

Keterangan	Jenis Belanja		Total
	Belanja Barang	Belanja Modal	
Pagu	Rp1.665.483.000	Rp339.352.000	Rp2.004.835.000
Realisasi	Rp1.650.336.182	Rp339.109.497	Rp1.989.445.679
Persentase	(99,09%)	(99,92%)	(99,23%)

Serta pada Tahun Anggaran 2025 terdapat dua jenis sumber dana yaitu Rupiah Murni (RM) serta Penerimaan Bukan Pajak (PNBP), dengan rincian sebagai berikut.

Sumber Dana	Keterangan	Jenis Belanja		Total
		Belanja Barang	Belanja Modal	
RM	Pagu	Rp 1.665.483.000	Rp339.352.000	Rp2.271.661.000
	Realisasi	Rp 1.650.336.182	Rp339.109.497	Rp1.942.471.110
	Persentase	(99.09%)	(99.92%)	(99.23%)
PNBP	Pagu	Rp75.794.000	Rp0,00	Rp75.794.000
	Realisasi	Rp46.974.569	Rp0,00	Rp46.974.569
	Persentase	(61.98%)	(65.08%)	(61.98%)

Anggaran tersebut digunakan untuk mencapai tujuan organisasi yang sejalan dengan tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Pada tahun 2025, KPKNL Bontang memiliki 2 (dua) program, 8 (delapan) kegiatan, 12 (duabelas) klasifikasi rincian output, serta 20 (dua puluh) rincian output, dengan capaian setiap rincian output sebagai berikut.

No.	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Target	Total
1	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	14,770,000	14,127,500	95.65%	91 Kegiatan	135.16%
2	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	9,436,000	9,413,171	99.76%	62 Kegiatan	119.35%
3	Sosialisasi/edukasi di bidang lelang	780,000	779,000	99.87%	16 Kegiatan	125.00%
4	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	24,281,000	24,171,341	99.55%	38 Surat Keputusan	260.53%
5	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	26,760,000	26,445,136	98.82%	6 Surat Keputusan	116.67%
6	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	9,888,000	9,030,000	91.32%	74 Rekomendasi	122.97%
7	Risalah Lelang	26,128,000	25,760,000	98.59%	120 Dokumen	320.00%
8	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	17,286,000	14,602,000	84.47%	1 Rekomendasi	100.00%
9	Rekomendasi Hasil Penilaian	18,940,000	18,904,000	99.81%	2 Rekomendasi	100.00%
10	Penggalian Potensi Lelang	20,468,000	20,435,569	99.84%	2 Rekomendasi	100.00%
11	Rekomendasi BMN merupa tanah yang disertifikatkan	11,227,000	11,221,000	99.95%	42 Rekomendasi	161.90%
12	Layanan Bantuan Hukum	19,168,000	19,149,199	99.90%	2 Layanan	200.00%
13	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	50,000,000	49,799,999	99.60%	4 Unit	100.00%
14	Kerumahtanggaan	82,489,000	79,352,038	96.20%	12 Layanan	100.00%
15	Layanan Perkantoran	1,352,500,000	1,345,817,688	99.51%	12 Layanan	100.00%
16	Peralatan Fasilitas Perkantoran	249,491,000	249,449,497	99.98%	83 Unit	100.00%
17	Kendaraan Bermotor	51,501,000	51,500,001	100.00%	2 Unit	100.00%
18	Pembinaan/Edukasi Publik	612,000	408,000	66.67%	69 Orang	121.74%
19	Kehumasan	6,464,000	6,448,540	99.76%	30 Kegiatan	100.00%

No.	Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Target	Total
20	Rekomendasi Kepatuhan Internal	12,646,000	12,632,000	99.89%	5 Dokumen	120.00%

C. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Dalam rangka gerakan Efisiensi sebagai bagian implementasi penguatan budaya Kementerian Keuangan, Pada tahun 2025 KPKNL Bontang melakukan upaya penghematan energi diantaranya yaitu penggunaan listrik, air, BBM yaitu sebagai berikut

Jenis Energi	Periode	Rata-Rata Penggunaan	
		Volume	Biaya (Rp)
Listrik	Semester II 2025	6.334,17 kwh	10.777.655,33
	Semester I 2025	6.036,33 kwh	10.277.151,33
	Persentase Kenaikan/ Penurunan	4,93 %	4,87 %
Air	Semester II 2025	41,83 m3	162.250,00
	Semester I 2025	54,83 m3	259.812,50
	Persentase Kenaikan/ Penurunan	-23,70 %	-37,55 %
BBM	Semester II 2025	258,89 m3	3.066.915,00
	Semester I 2025	193,85 m3	2.508.019,33
	Persentase Kenaikan/ Penurunan	33,55 %	22,28 %

- Biaya langganan listrik cenderung stabil dengan kenaikan yang cukup rendah sebesar 4,87%;
- Biaya langganan air mengalami penurunan drastis hingga 37,55%

D. KINERJA LAIN LAIN

Pada Tahun 2025, KPKNL Bontang berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang Mahakam Treasury Award Semester I Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Samarinda. Dalam acara tersebut, KPKNL Bontang meraih dua penghargaan sekaligus, yakni Satuan Kerja dengan Nilai 100 atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Satuan Kerja dengan IPA dan Dukungan Digitalisasi Terbaik untuk periode Semester I Tahun 2025.

Selain itu, pada Tahun 2025, KPKNL Bontang mendapatkan Piagam Penghargaan Kategori Platinum sebagai kantor yang telah memenuhi syarat dalam penerapan Gedung Kantor Ramah Lingkungan di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Dalam rangka evaluasi dan mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja, KPKNL Bontang terus melaksanakan Dialog Kinerja Organisasi secara berkala setiap triwulan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kantor selaku Pemegang Peta Strategis KPKNL Bontang.

Tidak hanya tingkat organisasi, evaluasi individu juga dilaksanakan oleh masing masing atasan langsung melalui Dialog Kinerja Individu yang dilaksanakan setiap bulan yang memastikan adanya Coaching, Mentoring dan atau Conselling kepada staf/bawahan langsung, untuk mencapai tujuan kinerja masing-masing pegawai.



04.

Penutup

BAB IV PENUTUP

Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini dapat diketahui sampai sejauh mana kinerja yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil yang telah direncanakan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak terkait, mengenai pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Bontang serta upaya peningkatan good governance yang mengacu pada rencana strategis DJKN tahun 2025- 2029.

Pencapaian pelaksanaan kinerja KPKNL Bontang pada tahun 2025 secara umum dapat dikatakan sangat baik dan dari target 18 IKU yang telah ditetapkan, secara keseluruhan melebihi target yang telah ditetapkan, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 116,63%.

Pencapaian ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh pegawai di lingkungan KPKNL Bontang untuk lebih meningkatkan pencapaian kinerja pada periode berikutnya. Hal tersebut juga sejalan dengan upaya KPKNL Bontang dalam memberikan pelayanan terbaik.

Penyusunan laporan kinerja ini diakui masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, KPKNL Bontang siap menerima masukan, saran maupun koreksi untuk segala perbaikan di masa yang akan datang.



Lampiran



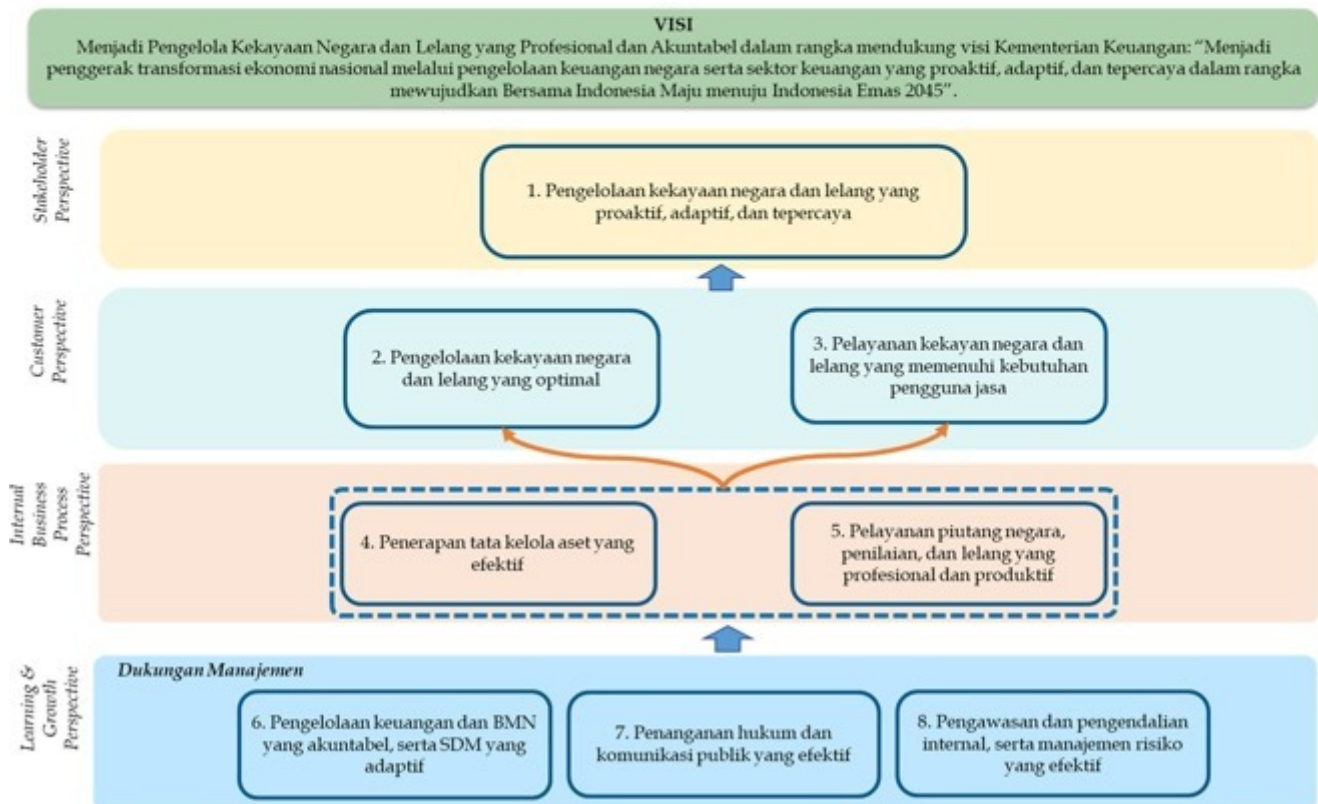
PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-04/WKN.13/2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BONTANG
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BONTANG
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN**

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	1a-CP Indeks integritas	100
		1b-CP Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (9,054 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%
		2b-CP Persentase realisasi pokok lelang	100% (133,1 M)
		2c-CP Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (70 Jt)
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3a-CP Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74
		3b-N Indeks kepuasan pengguna layanan	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%
		4b-CP Persentase evaluasi kinerja BMN	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	5a-CP Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (7 Berkas)
		5b-CP Tingkat kualitas layanan penilaian	70%
		5c-CP Persentase produktivitas lelang	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6a-CP Indeks kualitas kinerja anggaran	100
		6b-N Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100
		6c-N Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7a-CP Indeks penanganan permasalahan hukum	100
		7b-N Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8a-N Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80

Program/Kegiatan 2025

Anggaran

Program:

Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko

Rp246,477,000



Kegiatan

- | | |
|---|---------------|
| 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp67,262,000 |
| 2. Pengelolaan Aset | Rp179,215,000 |

Program:

Program Dukungan Manajemen	Rp1,859,003,000
----------------------------	-----------------

Kegiatan

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Legislasi dan Litigasi | Rp19,168,000 |
| 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp1,785,431,000 |
| 3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik | Rp29,112,000 |
| 4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp25,292,000 |

BONTANG UTARA, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan
Utara



Ditandatangani Secara Elektronik
Jose Arif Lukito

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Bontang



Ditandatangani Secara Elektronik
Harist Syafiuddin



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
BONTANG
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025

Kode SS/IKU	SS/IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya							
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (9,054 M)
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal							
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (133,1 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (70 Jt)
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa							
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif							
4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif							
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (7 Berkas)
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif							
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100



Kode SS/IKU	SS / IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif							
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif							
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

BONTANG UTARA, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Bontang



Ditandatangani Secara Elektronik
Harist Syafiuddin



**INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025**

No.	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory			Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Waktu	Kegiatan	Output			

BONTANG UTARA, 30 Januari 2025

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bontang



Ditandatangani Secara Elektronik
Harist Syafiuddin



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Harist Syafiuddin		NAMA	Jose Arif Lukito
NIP	19780222 200212 1 002		NIP	19710912 199603 1 001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I (IV/b)		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda (IV/c)
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bontang		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Bontang		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Timur dan Utara
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan tepercaya	Indeks integritas	100	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100% (9,054 M)	Penerima Layanan
2	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	Penerima Layanan
		Persentase realisasi pokok lelang	100% (133,1 M)	Penerima Layanan
		Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100% (70 Jt)	Penerima Layanan
3	Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang yang memenuhi	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	Penerima Layanan
		Indeks kepuasan pengguna layanan	77	Penerima Layanan

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



	kebutuhan pengguna jasa			
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
		Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	Proses Bisnis
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100% (7 Berkas)	Proses Bisnis
		Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	Proses Bisnis
		Persentase produktivitas lelang	80%	Proses Bisnis
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Persentase pengembangan kompetensi pegawai	80%	Penguatan Internal atau Anggaran
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	Penguatan Internal atau Anggaran
		Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	Penguatan Internal atau Anggaran
8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran
B. TAMBAHAN				



PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	<ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.</p>
2	Akuntabel	
	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
3	Kompeten	
	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p>
4	Harmonis	
	<ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>
5	Loyal	



PERILAKU KERJA		
	<ul style="list-style-type: none"> -Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah -Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara -Menjaga rahasia jabatan dan negara 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p>
6	Adaptif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan -Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas -Bertindak proaktif 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p>
7	Kolaboratif	
	<ul style="list-style-type: none"> -Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi -Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah -Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama 	<p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p>



BONTANG UTARA, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Jose Arif Lukito

19710912 199603 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Harist Syafiuddin

19780222 200212 1 002

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2025

DUKUNGAN SUMBER DAYA								
1.	20 pegawai							
2.	<i>Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.</i>							
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN								
<i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i>								
No	IKI	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1a-CP	Indeks integritas	100	100	100	100	100	100	100
1b-CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (9,054 M)
2a-CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (133,1 M)
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (70 Jt)
3a-CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	74	74	74	74	74	74	74
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	77	77	77	77	77	77	77



4a-CP	Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5a-CP	Persentase realisasi penyelesaian berkas piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100% (7 Berkas)
5b-CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	70%	70%	70%	70%	70%	70%	70%
5c-CP	Persentase produktivitas lelang	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%
6a-CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	100	100	100	100	100	100	100
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	100	100	100	100	100	100	100
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	20%	40%	40%	60%	60%	80%	80%
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	100	100	100	100	100	100	100
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	80	80	80	80	80	80	80
8a-N	Indeks kualitas manajemen kinerja dan Risiko	80	80	80	80	80	80	80

KONSEKUENSI

Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



BONTANG UTARA, 30 Januari 2025

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani Secara Elektronik

Jose Arif Lukito

19710912 199603 1 001

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Harist Syafiuddin

19780222 200212 1 002

Perjanjian Kinerja berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 dan ditetapkan secara elektronik menggunakan digital signature pada tanggal 30 Januari 2025





PIAGAM MANAJEMEN RISIKO
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
KANTOR WILAYAH DJKN KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2025
NOMOR: 04/WKN.13/2025

Dalam rangka pencapaian sasaran organisasi pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang, saya menyatakan bahwa:

1. Perumusan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi, dan rencana mitigasi Risiko telah dilaksanakan sesuai ketentuan Manajemen Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan.
2. Rencana mitigasi Risiko yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit yang saya pimpin.
3. Pemantauan dan review akan dilaksanakan secara berkala untuk meningkatkan efektivitas Manajemen Risiko.

Bontang, 30 Januari 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani Secara Elektronik
Harist Syafiuddin



DAFTAR RISIKO
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG BONTANG
TAHUN 2025

No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko	
			Awal Periode	Residual Harapan
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya	1.1 Adanya pelanggaran disiplin, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik pegawai	16	6
		1.2 Adanya pelaksanaan pemanfaatan BMN K/L yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	11	5
		1.3 Permohonan lelang dari aset eks PKP2B meningkat. (upside risk)	16	11
2.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2.1 Optimalisasi Penggunaan BMN <i>Underutilized</i> Tidak Terlaksana Sesuai Rencana	13	6
		2.2 Adanya Pembatalan Lelang	17	9
		2.3 Piutang negara yang di setor rendah	14	9
3.	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa	3.1 Adanya keluhan/komplain dari pengguna layanan	12	4
		3.2 Pemahaman pengguna layanan terhadap peraturan pengelolaan kekayaan negara, pelayanan penilaian, piutang negara, dan lelang yang rendah	13	11
		3.3 Hasil penilaian tidak digunakan dalam pencatatan neraca laporan keuangan, pemanfaatan dan pemindahtangan BMN	6	2
4.	Penerapan tata kelola aset yang efektif	4.1 BMN Berupa Tanah Tidak Dilengkapi Dokumen Kepemilikan (Sertipikat Hak Pakai)	18	16
		4.2 Evaluasi Kinerja BMN Tidak Dapat Diimplementasikan Secara Efektif	13	11
5.	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan	5.1 Rendahnya Pelunasan Berkas Kasus Piutang Negara	13	11



No.	Sasaran Organisasi	Kejadian Risiko	Besaran Risiko		
			Awal Periode	Residual Harapan	
	lelang yang profesional dan produktif	5.2	Adanya hambatan dalam pemberian layanan penilaian yang akuntabel dan professional	11	6
		5.3	Pelaksanaan lelang tidak ada peminat	22	14
6.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif	6.1	Ownership pegawai terhadap organisasi	9	4
		6.2	Ketidaksesuaian antara rencana penarikan dana dengan realisasi penggunaan anggaran	8	5
		6.3	Barang dan jasa yang diadakan tidak sesuai spesifikasi.	6	5
		6.4	Adanya pegawai yang tidak mengikuti / memenuhi panggilan diklat	9	4
7.	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif	7.1	Putusan Pengadilan Kalah	21	15
		7.2	Ketidaktepatan Waktu Tindak Lanjut Permintaan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana DJKN	10	5
8.	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif	8.1	Laporan Kinerja dan Risiko disampaikan terlambat/tidak sesuai ketentuan	6	5

Bontang, 30 Januari 2025
Kepala Kantor



Ditandatangani Secara Elektronik
Harist Syafiuddin



ADENDUM PERJANJIAN KINERJA NOMOR: 04A/WKN.13/2025

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-04/WKN.13/2025 tanggal 31 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Semula			Menjadi		
			Indikator Kinerja	Target		Indikator Kinerja	Target
3.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	2a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 % (70 Juta)	2a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 % (161 Juta)

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

Semula									Menjadi								
Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target							Kode IKU	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y
2a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	2a-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Menyetujui,
Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara

Bontang, 01 Oktober 2025
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang



Ditandatangani secara elektronik
Jose Arif Lukito



Ditandatangani secara elektronik
Anas Waskita Jati

ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang tanggal 31 Januari 2025, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
3.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 % (70 Juta)	Penerima Layanan

Semula				
No.	Rencana Hasil Kerja	Indikator Kinerja Individu	Target	Perspektif
3.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang optimal	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100 % (161 Juta)	Penerima Layanan

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

Sebelum									Menjadi								
No.	Indikator Kinerja Individu	Target							No.	Indikator Kinerja Individu	Target						
		Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y			Q1	Q2	S.d. Q2	Q3	S.d. Q3	Q4	Y
3.	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3.	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Pejabat yang dinilai,

Bontang, 01 Oktober 2025
Pejabat Penilai kinerja,



Ditandatangani secara elektronik
Anas Waskita Jati



Ditandatangani secara elektronik
Jose Arif Lukito



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA